

Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rahmi, Junaidin

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Email: rahmimaman@gmail.com

Article Information

Submitted: 29 Juni 2024

Accepted: 16 Juli 2024

Online Publish: 16 Juli 2024

Abstrak

Kekerasan sering terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat dengan hubungan personal yang kuat. Kekerasan dapat menimpa anak maupun istri. Menurut fajarmedia.com, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat 23 kasus KDRT pada tahun 2022. Melihat maraknya KDRT, pemerintah perlu berupaya mengurangi kasus tersebut. Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam mencegah KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori POACE untuk memahami tahapan strategi komunikasi DP3A. Pada tahap perencanaan, DP3A mengadakan rapat kerja untuk merancang rencana kegiatan, menyusun draf, menentukan sasaran, dan tujuan kegiatan dengan melibatkan pihak eksternal seperti kepolisian dan MUI. Pada tahap persiapan, dilakukan survei lapangan untuk memahami geografis dan kultur desa sasaran, pemberitahuan kepada desa sasaran, dan melibatkan ibu-ibu PKK agar sosialisasi tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi tatap muka, penggunaan media seperti power point, poster, dan leaflet untuk menarik perhatian sasaran. Pada tahap pengontrolan, pimpinan DP3A ikut serta mengawasi dan mengontrol kegiatan untuk memberikan contoh yang baik dan mengambil keputusan tepat. Tahap evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengarsipkan masalah atau kekurangan dari tahap perencanaan hingga evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Semua anggota yang terlibat diberi kesempatan untuk memberikan saran terkait kekurangan kegiatan tersebut.

Kata Kunci: *Strategi, komunikasi, KDRT*

Abstract

Violence frequently occurs in various aspects of society, including within households, which should ideally be places with strong personal relationships. Violence can affect both children and wives. According to fajarmedia.com, the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning reported 23 cases of domestic violence (DV) in 2022. Given the prevalence of DV, the government needs to take steps to reduce these cases. This study focuses on the communication strategy of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Bima Regency in preventing DV. The research employs qualitative methods, collecting data through observation, interviews, and documentation. Data analysis utilizes the POACE theory to understand the stages of DP3A's communication strategy. In the planning stage, DP3A holds work meetings to draft activity plans, define targets, and set objectives, involving external parties such as the police and MUI. During the preparation stage, field surveys are conducted to understand the geography and culture of the target villages, notifications are sent to these villages, and local PKK

How to Cite

DOI
e-ISSN
Published by

Rahmi, Junaidin/Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)/Vol 5 No 3 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.423>
2721-2246
Rifa Institute

Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

members are involved to ensure effective outreach. Implementation involves face-to-face socialization, using media such as PowerPoint, posters, and leaflets to capture the audience's attention. In the controlling stage, DP3A leadership participates in supervising and monitoring activities to set a good example and make appropriate decisions. The evaluation stage involves collecting and archiving issues or shortcomings from the planning to the evaluation phases for future improvement. All participants are given the opportunity to provide feedback on any deficiencies encountered during the activities.

Keywords: Strategy, Communication, Domestic Violence.

Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan kita. Pada umumnya korban KDRT lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak (Herawati et al., 2021); (Mustafainah et al., 2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk penyimpangan terhadap hak asasi manusia dan termasuk dalam perbuatan kriminal. Perempuan seringkali menjadi sasaran korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan baik tapi malah mendapatkan hal sebaliknya (Hemafitria et al., 2023). Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling menyayangi dan berbuat baik dengan sesama pasangannya, berjalan berdampingan untuk bersama-sama membentuk keluarga yang sakinah. Tetapi realita yang terjadi di masyarakat adalah masih banyak terjadi perilaku-perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya (Suhada, 2022); (Suwarni, 2023). Dan anehnya masih banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyembunyikan dan tidak mau terbuka dengan apa yang telah dialaminya, salah satu alasannya karena masih ingin memperjuangkan keutuhan keluarga dan memilih untuk menutupi kasus tersebut dari pihak luar (Martha & Ull, n.d.).

Pembentukan Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti anggota konvensi CEDAW (*Convention On the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*) atau konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Dewi et al., 2023); (Ramadhan et al., n.d.). Adapun hukum positif yang mengatur tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mengatasi problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), secara spesifik Negara Indonesia adalah Negara hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan semua sama di mata Hukum (Jesia Boru Siantaru, 2022) (Perempuan et al., n.d.).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai dari Januari hingga Desember 2022 sudah terdata 25 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melalui Ketua Koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Siti Romlah S.sos M.M dan didampingi oleh Rifa'i S.Sos M.AP menjelaskan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tahun 2021 ada 8 kasus sedangkan mulai Januari hingga Desember 2022 ada 25 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jumlahnya fluktuatif, artinya ada trend turun dan juga naik secara signifikan (Sri Mulyati, 2022). Bahkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Bima sudah diangkat oleh beberapa media di Tahun 2022, salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Monta "Seorang Istri Dianiaya Hingga Berlumuran Darah" dalam rilis berita (Katada.id). Adapun

alasanya karena faktor ekonomi dan hadirnya orang ketiga. Dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi di seluruh penjuru Dunia (Pakasi et al., 2018).

Perkembangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terus meningkat, berdasarkan rekapan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima tentang laporan korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah serta meminimalisir penambahan angka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi “Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak” dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Timbulnya beberapa permasalahan menjadikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, belum terlaksana secara efektif. Salah satunya yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bima, permasalahan yang dialami adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi masih rendah. Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bima Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bima dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bima, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Tahapan pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait serta observasi langsung terhadap pelaksanaan strategi komunikasi oleh DP3A. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang relevan; triangulasi metode mencakup penggunaan wawancara dan observasi untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif; dan triangulasi teori melibatkan penerapan berbagai teori yang relevan untuk menginterpretasi data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan untuk mengidentifikasi tema atau pola utama. Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, seperti dalam matriks atau grafik. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi, dilakukan dengan menganalisis data yang telah disajikan untuk menemukan kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang efektivitas strategi komunikasi yang digunakan oleh DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bima.

Hasil dan Pembahasan

Ditinjau dari konsep analisis strategi komunikasi maka peneliti dapat menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih mengacu pada teori George R. Terry dalam bukunya *principles of management* (Sukarna, 2011:10) menjelaskan 5 sub dalam strategi komunikasi yaitu:

Planning (perencanaan)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, indikatornya dengan melihat pada rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai yang tercantum dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, mempunyai beberapa program kerja yaitu, sosialisasi pencegahan terhadap perempuan, pembinaan organisasi perempuan, pembinaan usaha perempuan, pemilihan 10 perempuan inspiratif dari semua pihak profesi.

Dalam menyusun program kerja, rapat program kerja diadakan untuk setiap divisi, baik untuk program jangka panjang maupun jangka pendek. Dinas telah merancang program ini dengan sangat baik. Program yang disusun antara lain sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pembinaan organisasi perempuan, pembinaan usaha perempuan, pemilihan 10 perempuan inspiratif dari berbagai profesi yang dilakukan sekali dalam setahun, serta rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Tahap awal dalam merancang kegiatan sosialisasi untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bima bertujuan memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan lagi. Diharapkan, hasil dari kegiatan sosialisasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan berkeluarga. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima terlebih dahulu merencanakan tempat pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pencegahan KDRT.

Dalam hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan Hj. Siti Romlah, S. Sos., M.M., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP), yang menyatakan bahwa saat rapat, mereka menyampaikan rencana dari bidang pemberdayaan perempuan untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan KDRT sebanyak 4-5 kali dalam setahun, khususnya di desa-desa yang rawan terjadi kekerasan. Hj. Siti Romlah juga menambahkan bahwa banyak yang harus dirancang sebelum melakukan kegiatan, terutama mengenai tempat dan waktu pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar. Sasaran dan tindakan ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika sudah matang dalam perencanaan maka hasilnya juga akan sesuai dengan tujuan yang sudah di targetkan, menetapkan sasaran dan tindakan untuk mencapai tujuan adalah salah satu awal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima melakukan suatu kegiatan, tindakan ini meliputi apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana efeknya. Maka di pandang perlu untuk merencanakan dengan tuntas agar tidak berhenti di tengah jalan. Dan berdasarkan data dokumentasi yang diterima oleh peneliti maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, menggelar rapat dengan seluruh anggota bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) untuk merancang kegiatan sosialisasi tersebut (Syahfitri & Rangkuti, 2024).

Organizing (persiapan)

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, mempersiapkan waktu satu hari untuk turun di lokasi terlebih dahulu untuk melakukan survei sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, dan bekerja sama dengan pemerintah setempat demi kelancaran kegiatan tersebut, kemudian menjelang beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan akan dibawakan surat pemberitahuan sekaligus surat undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut maka dipandang perlu kerja ekstra demi melancarkan kegiatan yang dibangun (Siregar & Listyaningsih, 2022).

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh tanpa membedakan tingkat pendidikan peserta. Hj. Siti Romlah, S.Sos., M.M, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, tim dari DP3A melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai contoh, di Desa Wera, mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat seperti Dokter Veti untuk mengundang sekitar 100-150 orang dari berbagai latar belakang untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Selain itu, DP3A berkoordinasi dengan pengurus desa agar informasi mengenai kegiatan sosialisasi ini dapat tersebar luas di masyarakat.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Nurdin, S. Sos, Kepala DP3A Kabupaten Bima, yang menegaskan pentingnya survei lapangan untuk melihat kondisi geografis dan memastikan keterlibatan ibu-ibu PKK dalam persiapan sosialisasi. Menurut beliau, keterlibatan berbagai pihak lokal sangat penting untuk memastikan sosialisasi berjalan efektif dan efisien.

Bapak Rifa'i, S.Sos., M.Ap, anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan, menambahkan bahwa tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan KDRT kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak muda. Menurut beliau, dengan memberikan edukasi sejak dini, diharapkan generasi muda dapat menghindari perilaku kekerasan dalam rumah tangga di masa depan (Hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2024).

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat berpendidikan tinggi, tetapi juga masyarakat umum dengan berbagai latar belakang pendidikan. Tujuannya adalah agar semua peserta dapat menerima informasi dan pengetahuan tentang KDRT dan kemudian menyebarkannya kepada masyarakat lain di desa masing-masing. Selain itu, DP3A Kabupaten Bima juga menerima Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari DP3A Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan materi yang sama seperti yang disampaikan saat sosialisasi di Kabupaten Bima. Bapak Rifa'i menekankan bahwa persiapan yang matang sangat penting sebelum melakukan sosialisasi. Menurut beliau, penyampaian materi yang baik, santai, dan mudah dimengerti oleh pendengar akan menghasilkan umpan balik yang positif dari peserta sosialisasi, sehingga penting bagi tim DP3A untuk bersabar dan teliti dalam membimbing masyarakat.

Melalui Bimtek yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) provinsi nusa tenggara barat, akan menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, karna bisa mengambil contoh yang terbaik dari apa yang didapatkan dari bimtek tersebut dan bisa juga menerapkan di masyarakat kabupaten Bima pada umumnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, adalah sumber informasi bagi semua masyarakat yang mengikuti sosialisasi dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seorang komunikator harus pandai dalam cara

Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

penyampaian, harus mempunyai gaya tersendiri dalam melakukan komunikasi agar komunikasi tetap semangat dalam proses penerimaan arahan/materi yang disampaikan tersebut. Maka dalam hal *actualizing* komunikator harus menjalankan fungsinya sebagai seorang komunikator yang handal di hadapan komunikan, karena sebagai pengirim (*sender*) harus maksimal dalam menyampaikan informasi (*information*) agar mendapatkan *feed back* dari komunikan atau penerima pesan (Peningkatan et al., 2023).

Actualizing (pelaksanaan)

Memilih media yang tepat terlebih dahulu mengetahui informasi lapangan yang telah dipetakan, yakni apakah khalayak yang menjadi target sasaran rata-rata memiliki media sosial, televisi, radio, atau media yang berlangsung surat kabar, maka komunikasi saluran yang tepat digunakan adalah tatap muka (Sitorus & Salsabila, 2022). Dalam melaksanakan sosialisasi, saluran komunikasi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima adalah secara tatap muka secara langsung (*face to face*). Hal ini dirasa paling efektif dalam menyampaikan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima melaksanakan sosialisasi tatap muka sebagai metode utama untuk mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan tatap muka dianggap sebagai cara paling efektif untuk menyampaikan materi karena memungkinkan adanya interaksi langsung antara komunikator dan komunikan. Hal ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar informasi secara mendalam dan membangun kesadaran masyarakat secara lebih efektif.

Untuk menjaga minat dan perhatian peserta selama sosialisasi, DP3A Kabupaten Bima menggunakan berbagai strategi, seperti memberikan doorprize kepada peserta yang aktif bertanya, menggunakan layar proyektor untuk memperjelas materi yang disampaikan, serta mengajak audiens untuk menyebutkan yel-yel. Menurut pernyataan pihak DP3A, hal ini dilakukan untuk mencegah kebosanan dan menjaga semangat peserta selama sosialisasi berlangsung. Di akhir kegiatan, DP3A juga membagikan brosur yang berisi informasi tentang pencegahan KDRT, yang bertujuan agar pesan yang disampaikan tetap diingat oleh peserta.

Wawancara dengan tiga peserta sosialisasi memberikan wawasan tambahan mengenai efektivitas program ini. Ibu Ayu Wulandari menyoroti pentingnya pemahaman dan kesabaran dalam menghadapi konflik rumah tangga, serta pentingnya menghindari emosi berlebihan antara pasangan. Ibu Eka Faturrahman dari Desa Tangga, Kecamatan Monta, menyatakan bahwa DP3A juga memberikan perabotan rumah tangga sebagai bantuan tambahan, serta arahan kepada korban dan pelaku kekerasan untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Ibu Indi Wiwihidih dari Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, yang mengikuti sosialisasi pada tahun 2022, menekankan bahwa materi yang disampaikan juga mencakup penjelasan hukum dari pihak kepolisian mengenai konsekuensi bagi pelaku kekerasan, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Berdasarkan tanggapan peserta, terlihat bahwa DP3A Kabupaten Bima telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan penyadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk laki-laki, serta pemberian arahan dan informasi hukum, menunjukkan upaya komprehensif DP3A dalam mengatasi permasalahan KDRT di wilayah mereka (Sitorus & Salsabila, 2022).

Controlling (pengontrolan)

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan dukungan pemimpin terhadap kebutuhan serta harapan bawahan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menilai kinerja bawahannya dengan memperhatikan keterbatasan mereka, seperti rendahnya kemampuan, kurangnya pengalaman, dan pelatihan yang dibutuhkan (Toun, 2018). Hal ini diungkapkan oleh seorang Kepala Dinas yang menekankan pentingnya saling memahami dan memberikan nasehat kepada bawahan agar tetap sabar dan bekerja dengan baik.

Seorang pemimpin yang efektif juga diharapkan mampu memanusiaikan manusia, menerima kekurangan masing-masing, dan bersabar dalam menghadapi berbagai permasalahan. Motivasi kepada bawahan sangat penting agar mereka tetap semangat menjalankan tugas. Semua kegiatan membutuhkan proses yang panjang, dan hasil yang baik memerlukan perjuangan yang tidak akan mengkhianati hasilnya.

Selain itu, seorang komunikator dalam kegiatan sosialisasi juga harus mampu mengendalikan emosi. Hal ini penting agar kegiatan berjalan dengan aman dan lancar, terutama saat menghadapi kritik dari peserta. Anggota bidang Pemberdayaan Perempuan, Bapak Rifa'i, menegaskan bahwa pengendalian emosi tidak hanya tugas pemimpin, tetapi juga narasumber dan pelaksana kegiatan. Ketika menghadapi kritik, mereka harus bisa mengontrol emosi agar tidak terpancing oleh pertanyaan yang provokatif.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Hj. Siti Romlah, menekankan bahwa pengontrolan emosi adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, sehingga penting bagi tim untuk menjaga agar emosi tetap terkontrol dan kegiatan berjalan lancar.

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa pengontrolan diri dan pengendalian emosi adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kepemimpinan. Tanpa pengontrolan diri, emosi yang memuncak dapat membuat seseorang bertindak di luar nalar, sehingga mengontrol emosi adalah keharusan yang harus selalu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal (Novrian & Madonna, 2021).

Evaluating (evaluasi)

Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima. Evaluasi dilakukan minimal sekali setelah kegiatan selesai sebagai langkah untuk mengumpulkan dan mengarsip setiap permasalahan atau kekurangan yang terjadi. Evaluasi ini merupakan sarana pengendalian yang efektif selama kegiatan berlangsung dan bertujuan untuk menata kembali kekurangan yang ada sehingga tidak terulang di kegiatan berikutnya (Goha et al., 2023).

Menurut Kepala DP3A Kabupaten Bima, Bapak Nurdin, S.Sos, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Siti Romlah, S.Sos., M.M, evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan sangat penting. Mereka menegaskan bahwa semua saran dan kritik dari masyarakat akan dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Sikap terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat menunjukkan komitmen DP3A dalam meningkatkan kualitas layanan dan program yang dijalankan.

Proses evaluasi memungkinkan pertukaran informasi antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ini membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan serta menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa depan. Evaluasi juga menjadi alat ukur yang akurat untuk menilai sejauh mana kegiatan berhasil mencapai tujuannya.

Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

DP3A Kabupaten Bima menggunakan evaluasi untuk meninjau arah strategi yang diambil dan mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk melakukan evaluasi yang efektif, kekompakan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sangat diperlukan. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber selama proses evaluasi membantu DP3A dalam mengambil langkah korektif dan menyusun strategi yang lebih baik untuk kegiatan berikutnya. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai proses pembelajaran berkelanjutan bagi DP3A dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Jika seluruh kegiatan sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah evaluasi, baik dari kesalahan yang terkecil sampai dengan kesalahan yang besar, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan dalam suatu kegiatan, karna semua yang di evaluasi akan dijadikan sebagai pelajaran yang berharga untuk kegiatan yang selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, sebagai salah satu dinas yang menangani kasus kekerasan yang ada di seluruh Kabupaten Bima harus mampu memberikan yang terbaik untuk semua masyarakat terutama kepala perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, dan semoga lewat sosialisasi ini juga masyarakat bisa sadar agar tidak ada yang saling melakukan kekerasan baik terhadap perempuan yang sudah dewasa maupun terhadap anak yang masih di bawah umur. Evaluasi harus benar-benar banyak melibatkan komunitas yang telah diberikan kepercayaan menjadi kelompok pelaksana program kerja tersebut. Dan berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan bahwa pada tahap evaluasi ini akan diberikan kesempatan masing-masing agar bisa menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan selama proses berjalannya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut (Sidiq, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada tahapan *planning* atau perencanaan DP3A melakukan rapat kerja dimana pada tahapan tersebut mulai merancang rencana kegiatan, menyusun draf rencana kegiatan, menentukan sasaran kegiatan, tujuan kegiatan. Pada tahapan perencanaan DP3A mengikutsertakan pihak-pihak eksternal seperti kepolisian, MUI dalam menyusun rencana kerja. Selanjutnya pada tahap *Organizing* (persiapan) kegiatan yang dilakukan berupa survei lapangan, jadi setiap Desa yang menjadi sasaran sosialisasi tujuannya untuk memahami geografis dan kultur desa sasaran. Selain itu, pemberitahuan kepada desa sasaran dan mengikutsertakan ibu-ibu PKK di desa setempat sehingga diharapkan sosialisasi yg dilakukan tepat sasaran. Pada tahapan *Actualizing* (pelaksanaan) kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi yang berlangsung secara tatap muka atau secara langsung, kemudian alat bantu lainnya berupa media *power point, poster, leaflet* dengan tujuan agar mempermudah dan menarik perhatian sasaran sosialisasi yang dilakukan. Selain itu, DP3A melalui tahapan pelaksanaan menyampaikan secara langsung agar KDRT tidak terjadi lagi. Tahapan *Controlling* (pengontrolan), pada fase ini unsur pimpinan ikut serta dalam mengontrol dan mengawasi berbagai tahapan kegiatan yang sudah dilakukan. pemimpin ikut serta mengontrol berjalannya kegiatan sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik untuk semua bawahannya dan pemimpin yang bijak akan selalu tepat dalam mengambil keputusan, karna keputusan tertinggi hanya ada pada seorang pemimpin. Tahap *Evaluating* (evaluasi) seluruh kegiatan telah selesai. Langkah inilah yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengarsipkan setiap masalah atau kekurangan yang terjadi mulai dari *planning* (perencanaan) sampai dengan *evaluating* (evaluasi) untuk kemudian diperbaiki di lain waktu, dan semua anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan diberikan kesempatan untuk berbicara agar saling memberikan saran terkait apa saja kekurangan pada saat kegiatan..

BIBLIOGRAFI

- Dewi, M. R., Paraniti, A. . S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 13–28. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>
- Goha, A. E., Santie, Y. D. A., & Salem, V. E. T. (2023). ... Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Manado Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak (Studi *Etic (Education and ...*, 1, 11–20.
- Hemafitria, H., Octavia, E., & Markononi, A. (2023). Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 134–148. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.4100>
- Herawati, R., Pinilih, S. A. G., & Nurcahyani, A. S. (2021). Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 131–142. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>
- Jesia Boru Siantaru, S. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, 1951*.
- Martha, A. E., & Ull, P. (n.d.). *Aroma Elmina Martha, 2003*,. 1–50.
- Mustafainah, A., Qibtiyah, A., Ridwan, A. I., Sandiata, B., Christina Yulita Purbawati, D. M., Situmorang, Feby, D., Gito, E., Setia, I. H., Sulastry, I., Amiruddin, M., Anshor, M. U., Nahe'i, I., Ngatini, Salampessy, O. C., Hutabarat, R. M., Ratnawati, R., Refliandra, R., Satyawanti, ... Asriyanti, Y. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. In *Komnasperempuan*.
- Novrian, N., & Madonna, M. (2021). Penyuluhan komunikasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *URGENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 24–31.
- Pakasi, D., Kartikawati, R., Zahro, F. A., Azzahra, A., & ... (2018). *Situasi Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja, dan Sunat Perempuan di Kabupaten Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat (Studi Midline 2018)*.
- Peningkatan, A., Utara, S., Dinas, M., Perempuan, P., Anak, P., Dinas, P., Perempuan, P., Anak, P., Utara, P. S., & Kunci, K. (2023). *Preaty+Sasia*. 3(2), 1–9.
- Perempuan, P., Perlindungan, D. A. N., Kota, A. D. P. A., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., Mab, K., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., Mab, K., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., & Mab, K. (n.d.). *KORBAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin . Yogyakarta : Pustaka Pelajar* ,. 3–5.
- Ramadhan, R. F., Septarina, M., Hukum, I., Kalimantan, U. I., Muhammad, U., Al, A., Hukum, I., Kalimantan, U. I., Muhammad, U., Al, A., Hukum, I., Kalimantan, U. I., Muhammad, U., & Al, A. (n.d.). *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi COVID-19 Email : rifqi.fr88@gmail.com Waluyo , Bambang . 2002 . Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta : PT Sinar Grafika . Kanwil Kemenag Kalsel . Kemenag Kota Banjarmasin Selenggarakan*

Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 3–4.*
- Sidiq, A. (2019). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmpp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 152–170.
- Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(4), 1022–1037. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022-1037>
- Sitorus, N. K. W., & Salsabila, L. (2022). Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam. *Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 1–9.
- Sri Mulyati. (2022). *Pendekatan Keagamaan Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bima.*
- Suhada, T. (2022). *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A).*
- Suwarni, M. (2023). *Mis Suwarni.*
- Syahfitri, A., & Rangkuti, Z. A. (2024). *Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan. 4, 1772–1787.*
- Toun, N. R. (2018). *Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 14(1), 21.*

Copyright holder:

Rahmi, Junaidin (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

